



POPULASI ANAK DI KOTA YOGYA CAPAI 27 PERSEN

Komitmen Wilayah Topang Predikat KLA Paripurna

YOGYA (KR) - Kota Yogya berupaya memenuhi hak-hak anak melalui berbagai program guna mewujudkan predikat kota layak anak (KLA) kategori paripurna. Komitmen yang ada di wilayah sangat menopang keberhasilan program tersebut.

Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya Sri Isnayanti Sudiasih, menjelaskan, untuk mewujudkan KLA secara paripurna maka peran wilayah atau kelurahan harus terus dilakukan penguatan dan optimalisasi program-program yang mendukung KLA.

"Ketika 45 kelurahan di Kota Yogya sudah secara optimal menyelenggarakan program pemenuhan dan perlindungan hak anak yang mengacu pada lima klaster, maka KLA secara paripurna dapat tercapai. Tentunya

dengan keterlibatan lintas sektor, utamanya dalam pemetaan indikator KLA apa saja yang masih ada kendala, dan mitigasi supaya tidak menimbulkan persoalan anak yang berkelanjutan," urainya, Kamis (16/5).

Hingga saat ini populasi anak di Kota Yogya mencapai 27 persen dari total penduduk. Dengan kata lain, 109.477 orang dari 412.589 penduduk Kota Yogya adalah kaum anak. Tingginya populasi tersebut mendorong aparat pemerintah untuk menjamin tumbuh kembangnya dengan pemenuhan hak anak secara optimal.

Menurutnya pelaksanaan program KLA pada lima klaster telah berjalan di 45 kelurahan di Kota Yogya. Di antaranya mulai dari klaster kelembagaan, pemenuhan hak sipil dan kebebasan, lingkungan dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan

budaya, serta perlindungan khusus.

"Kelima klaster dengan setiap indikatornya telah berjalan di tingkat kelurahan, kemantren juga kota yang semuanya saling berkaitan. Untuk itu selain peran penyelenggara publik kami juga mendorong pengurus di wilayah untuk melibatkan partisipasi anak melalui forum anak yang nantinya terlibat menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya dalam musrenbang anak di tingkat kota. Sehingga rencana pembangunan dan alokasi anggaran di dalamnya semakin responsif pada perlindungan dan pemenuhan hak anak," paparnya.

Sementara Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogya Hari Muryanto, mengatakan perlindungan khusus anak juga berkaitan dengan persoalan dan kasus anak menjadi korban ataupun pelaku kekerasan. Sepanjang tahun 2023 lalu KPAID Kota

Yogya menangani 37 kasus. Sementara data kekerasan terhadap anak yang ditangani UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di tahun 2023 ada 85 kasus. "Dalam menyikapi kasus kekerasan terhadap anak, yang harus terus kita perkuat adalah mitigasi dan pencegahan. Ketika terjadi kasus maka pola penanganan dan alurnya sudah jelas. Setelah itu yang juga menjadi catatan penting adalah pasca penanganan. Sebab masih terjadi ketika anak sebagai korban atau pelaku telah mendapatkan penanganan dengan baik, ketika kembali ke masyarakat ternyata masih mendapatkan stigma," katanya.

Oleh karena itu ketika ada kasus maka pola penanganannya selain dilakukan pada anak juga pada orangtua ataupun keluarga inti. Terutama yang memiliki pengaruh berkaitan pola asuh dan perilaku setelah anak mendapat terapi atau pendampingan secara psikologis. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005